

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Uni Mawarnisa
unimawarnisa@gmail.com

Abstract

Financial statements are a form of government management's accountability in presenting information related to financial positions to stakeholders. This study aims to determine the influence of regional financial supervision and human resource competence on the quality of local government financial statements in Simeulue Regency. This study involved 45 District Government Work Units (SKPK) with a total of 90 financial managers as respondents, who were selected using the purposive sampling method. The hypothesis test was carried out using multiple linear regression analysis with SPSS software version 23. The results of the analysis show that, partially, regional financial supervision and human resource competence significantly affect the quality of local government financial statements in Simeulue Regency. Simultaneously, the two variables were also found to have a significant effect on improving the quality of the financial statements of the local government of Simeulue district.

Keywords: *Regional Financial Supervision, Human Resource Competencies, Quality of Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang baik (Firmansyah et al., 2022). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Laporan keuangan sendiri merupakan bentuk penyampaian informasi oleh pihak manajemen pemerintah kepada pemangku kepentingan terkait kondisi keuangan yang aktual. Laporan ini menjadi alat pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik serta menjadi jembatan bagi pihak luar yang tidak memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan pemerintah (Koto, 2019).

Laporan keuangan yang baik ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Partisipasi merujuk pada keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Sementara itu,

akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya secara terbuka kepada publik (Anwar, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sejumlah karakteristik kualitatif, termasuk relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Karakteristik-karakteristik ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan benar-benar bermanfaat dalam mendukung proses pengambilan keputusan (Anwar, 2019). Dalam kerangka teori agen, pemerintah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Manifestasi konkret dari tanggung jawab ini dapat dilihat melalui proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki wewenang untuk melakukan audit dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah.

Opini audit dari BPK memiliki hubungan erat dengan kualitas laporan keuangan. Sejak diterapkannya basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan pada tahun 2015, jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat, dari 70% pada 2016 menjadi 88,89% pada 2022. Meski demikian, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mencapai opini WTP, menandakan bahwa masih ada permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar (Firmansyah et al., 2022).

Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau kurangnya bukti pendukung atas transaksi keuangan seringkali menjadi penyebab laporan keuangan diberi opini selain WTP (Firmansyah et al., 2022). Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Penyebab utamanya bisa berasal dari penyusunan laporan yang tidak patuh terhadap standar akuntansi atau pencatatan transaksi yang tidak transparan, sehingga mengganggu kualitas laporan yang disajikan (Harun, 2019).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, ditemukan adanya

penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant yang dibatasi penggunaannya, tetapi digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan operasional sebesar Rp8.881.414,80. Akibatnya, dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya dan menjadi beban pada APBK tahun berikutnya. Kondisi ini 4 bertentangan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (E-PPID.bpk.go.id).

Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Mau et. al, 2022). Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mendefinisikan pengawasan keuangan sebagai proses yang sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan daerah dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, proses ini juga dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan, karena mengontrol kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Ridwan et al. (2021), berpendapat bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi tersebut. Menurut Nurlaila et, al. (2023), kompetensi sumber daya manusia mencerminkan kemampuan individu dan kolektif suatu organisasi untuk melaksanakan tugas secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia yang kompeten memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Mau et al. (2022) menjelaskan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Temuan dari berbagai studi sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam hubungan antara pengawasan keuangan regional dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Misalnya, penelitian oleh Mau et, al. (2022) menunjukkan

bahwa pengawasan keuangan regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan keuangan di Kabupaten Belu. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Aswandi (2018), yang menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dalam konteks organisasi nirlaba di Kota Padang. Hal ini juga terjadi pada variabel kompetensi SDM, di mana terdapat perbedaan hasil antara satu studi dengan studi lainnya (Animah et, al. 2020) dan (Aprisyah et, al. 2021). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih mendalam dalam konteks Provinsi Simeulue, yang mungkin memiliki karakteristik unik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi peningkatan kualitas laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Simeulue. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan serta kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan dalam organisasi, tak terkecuali di organisasi sektor publik. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola keuangan negara serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, yang disampaikan melalui laporan keuangan (Maria & Halim, 2021). Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada Tahun 1976.

Dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia, teori keagenan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen berkewajiban memenuhi kepentingan para prinsipal, yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dengan menyajikan laporan keuangan yang jujur, andal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin kuat pengawasan yang diterapkan dan semakin tinggi kompetensi individu yang menyusun laporan keuangan, maka semakin besar pula kemungkinan pemerintah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana laporan akuntansi mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna atau pembacanya. Laporan ini merupakan output dari proses akuntansi yang dirancang untuk menyediakan data relevan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku (Bahri, 2016).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta aktivitas transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Menurut Mahmudi (2016), penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif oleh para pemangku kepentingan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalamnya mudah dipahami, mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan, bebas dari interpretasi yang menyesatkan maupun kesalahan material, serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Selain itu, laporan tersebut juga harus dapat dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya untuk menilai konsistensi kinerja keuangan (Defitri, 2016). Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai

laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan (Hans, 2016).

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan terhadap keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang diterapkan guna memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip akuntabilitas. Kegiatan ini biasanya dilakukan di lapangan dan melibatkan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi (Mau et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mendeteksi potensi penyimpangan serta memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah

Adapun sumber pengawasan keuangan daerah dapat berasal dari beberapa aspek, antara lain:

1. Regulasi – Pengawasan dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 9 Tahun 2015 dan peraturan daerah mengenai tata kelola keuangan.
2. Lembaga pengawas – Institusi seperti BPK dan Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan formal terhadap kegiatan keuangan daerah.

3. Peran masyarakat – Masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan melalui partisipasi publik, pelaporan, serta keterlibatan dalam pengawasan anggaran secara terbuka.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi sumber daya manusia mencerminkan kapasitas individu maupun kolektif dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal, guna mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tingkat kompetensi tersebut memiliki peran langsung dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Ihsanti, 2014). Kompetensi bukan hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga meliputi cara berpikir, sikap kerja, dan hasil kerja yang konsisten dengan tujuan organisasi. Individu yang memiliki kompetensi tinggi akan menunjukkan performa kerja yang cepat, teliti, dan solutif dalam menghadapi tantangan (Mahardini & Miranti, 2018).

Dalam penyusunan laporan keuangan, kompetensi aparatur pemerintah memegang peranan krusial. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip akuntansi, tetapi juga memiliki latar belakang pendidikan yang relevan serta pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Utama et al. (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, maka semakin besar pula kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Hipotesis

H₁: Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pengawasan terhadap keuangan daerah merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi. Tujuan dari kegiatan pengawasan tidak semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi juga guna memastikan pelaksanaan aktivitas pemerintah berlangsung

sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ketika pengawasan dilaksanakan secara optimal, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat ditekan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya (Mau et al., 2022).

Dalam kerangka teori keagenan, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi agen, yaitu pemerintah daerah, guna memastikan bahwa mereka bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal, yaitu masyarakat. Melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengawasan memungkinkan terwujudnya tanggungjawab publik secara nyata.

Peningkatan kualitas LKPD melalui pengawasan dapat terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, aspek preventif, di mana pengawasan berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Kedua, aspek korektif, yang memungkinkan dilakukan perbaikan atas temuan-temuan dalam laporan sebelum laporan tersebut dipublikasikan (Rahmawati, 2017).

Temuan Ridwan et al. (2021) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Kerinci. Demikian pula, Mau et al. (2022) menemukan bahwa pengawasan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Belu.

H₂: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kompetensi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan memegang peran krusial, terutama dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mau et al. (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, maka semakin tinggi pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam kerangka teori keagenan, kompetensi berperan sebagai salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan seorang agen dalam memenuhi harapan dari pihak prinsipal.

Aparatur dengan kemampuan teknis yang baik serta wawasan yang memadai memiliki kecenderungan lebih besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Oleh karena itu, kompetensi merupakan faktor mendasar dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, temuan dari Animah dan Widia (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Modo et al. (2016) mengungkapkan bahwa kapasitas SDM berperan dalam meningkatkan mutu informasi laporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Mau et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Belu.

H₃: Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pengawasan keuangan yang diterapkan secara sistematis dan kompetensi sdm yang memadai merupakan kombinasi penting dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Pengawasan yang baik berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, sedangkan kompetensi sumber daya manusia menjadi modal utama dalam penyusunan laporan yang akurat, andal dan terstandarisasi (Mau et al., 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, kedua variabel ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan mutu bagi agen (pemerintah daerah) dalam memberikan akuntabilitas kepada prinsipal (publik). Ketika keduanya berjalan secara sinergis, potensi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi dapat diminimalisir, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan andal. Hasil penelitian Mau et al. (2022) menunjukkan bahwa secara simultan, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber

daya manusia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

Populas dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus kajian untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berada di wilayah Kabupaten Simeulue. Jumlah SKPK yang menjadi populasi penelitian sebanyak 45 SKPK, yang terdiri atas Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, serta Inspektorat.

Sampel

Menurut Suliyanto (2018) menyampaikan bahwa sampel merupakan perwakilan dari populasi yang mencerminkan sifat dan karakteristik populasi secara utuh dan digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Sementara itu, menurut Sugiyono (2018), sampel berfungsi sebagai representasi populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik seleksi sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria yang digunakan dalam seleksi sampel adalah kepala subbagian keuangan dan bendahara pengeluaran, serta memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh total 90 responden yang tersebar di 45 SKPK di Kabupaten Simeulue.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan penyaluran kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pernyataan yang telah disusun dengan baik yang nantinya akan diberikan kepada responden di SKPK Kabupaten Simeulue guna untuk menjawab pernyataan

tentan pengawasan keuangan daerah, kompetensi sdm dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Model Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan atau prosedur kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan. Sumber data yakni data primer berwujud daftar pernyataan serta data sekunder berwujud riset pustaka serta rujukan dari studi-studi sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Kuesioner

Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden selama periode waktu sekitar 1 bulan. Peneliti membagikan kuesioner sebanyak 90 kuesioner kepada responden, ada 2 kuesioner yang tidak dikembalikan sehingga yang dapat diolah untuk analisis data yaitu sebanyak 88 kuesioner.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menentukan gambaran data dari masing-masing variabel penelitian, dengan menampilkan rata-rata (rata-rata), nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Berdasarkan hasil tes deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 di berikut ini.

Table 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengawasan Keuangan Daerah	88	27	35	31.55	2.750
Kompetensi Sumber Daya Manusia	88	55	90	75.40	8.973
Kualitas Laporan Keuangan	88	51	85	71.23	7.201
Valid N (listwise)	88				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai rata-rata masing-masing variabel berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap pengawasan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, serta kualitas laporan keuangan tergolong positif dan berada pada tingkat yang memadai.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu merefleksikan variabel yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel pada tingkat signifikansi 0,05.

Table 2. Hasil uji validitas Pengawasan Keuangan Daerah

Instrument	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0.649	0,209	Valid
X1.2	0.766	0,209	Valid
X1.3	0.669	0,209	Valid
X1.4	0.780	0,209	Valid
X1.5	0.730	0,209	Valid
X1.6	0.715	0,209	Valid
X1.7	0.642	0,209	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Berdasarkan pada tabel 2, seluruh butir pernyataan pada variabel pengawasan keuangan daerah (X1) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,209). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item dalam instrumen tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam proses penelitian.

Table 3. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Instrument	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0.504	0,209	Valid
X2.2	0.742	0,209	Valid
X2.3	0.798	0,209	Valid
X2.4	0.694	0,209	Valid
X2.5	0.760	0,209	Valid
X2.6	0.711	0,209	Valid
X2.7	0.692	0,209	Valid
X2.8	0.851	0,209	Valid
X2.9	0.838	0,209	Valid
X2.10	0.795	0,209	Valid
X2.11	0.711	0,209	Valid
X2.12	0.707	0,209	Valid
X2.13	0.744	0,209	Valid
X2.14	0.530	0,209	Valid
X2.15	0.700	0,209	Valid
X2.16	0.583	0,209	Valid
X2.17	0.689	0,209	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) memenuhi kriteria validitas, ditunjukkan oleh nilai r hitung yang melebihi r tabel. Dengan demikian, seluruh instrumen pada variabel ini dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Table 4. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Instrument	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0.665	0,209	Valid
Y.2	0.683	0,209	Valid
Y.3	0.702	0,209	Valid
Y.4	0.778	0,209	Valid
Y.5	0.741	0,209	Valid
Y.6	0.727	0,209	Valid
Y.7	0.812	0,209	Valid
Y.8	0.783	0,209	Valid
Y.9	0.833	0,209	Valid
Y.10	0.687	0,209	Valid
Y.11	0.660	0,209	Valid
Y.12	0.784	0,209	Valid
Y.13	0.596	0,209	Valid
Y.14	0.626	0,209	Valid
Y.15	0.775	0,209	Valid
Y.16	0.742	0,209	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk pada Tabel 4, seluruh item pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) dinyatakan valid, ditunjukkan oleh nilai r hitung yang seluruhnya melebihi nilai r tabel. Dengan demikian, instrumen pada variabel ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji keandalan digunakan untuk menentukan sejauh mana instrumen dalam penelitian menghasilkan data yang konsisten jika pengukuran berulang dilakukan. Instrumen ini dikatakan dapat diandalkan jika nilai Alpha Cronbach $> 0,7$.

Table 5. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Std. Cronbach's alpha	Keterangan
Pengawasan keuangan daerah (X1)	0,834	0,7	Reliabel
Kompetensi sumber daya manusia (X2)	0,944	0,7	Reliabel
Kualitas laporan keuangan (Y)	0,943	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi internal yang tinggi. Dengan demikian, instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian. Keandalan ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan tahap analisis berikutnya, karena data yang dihasilkan diyakini bersifat konsisten dan representatif.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Table 6. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	18.389	6.650		2.765	.007
	Penawasan keuangan daerah	.473	.216	.181	2.193	.031
	Kompetensi sumber daya manusia	.503	.066	.627	7.608	.000

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang ditampilkan pada tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1) menunjukkan nilai signifikansi 0,031 t tabel 1,662, yang berarti pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000 t tabel 1,662, yang berarti kompetensi sdm berpengaruh signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, dua variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah dan kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Table 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	2328.361	2	1164.181	45.328
	Residual	2183.093	85	25.683	
	Total	4511.455	87		

Sumber. Hasil Pengolahan SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, nilai hitungan F adalah 45.328 sedangkan nilai tabel F diperoleh melalui tabel F ($Dk = k-1$, $Df = n-k-1$) sehingga $Dk = 3-1 = 2$, $Df = 88-2-1 = 85$, kemudian diperoleh 3,104. Dalam penelitian ini, nilai F-count adalah $45.328 > F\text{-tabel } 3.104$ dengan tingkat signifikansi yang diperoleh $0,000$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simeulue.

Pengawasan Keuangan Daerah Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue

Berdasarkan analisis data dari tabulasi daftar pernyataan yang dibagikan kepada responden diseluruh SKPK Kabupaten Simeulue, ditemukan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.

Hasil uji hipotesis pertama (H1) memberikan bukti bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem pengawasan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dapat dikatakan efektif dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018), pengawasan merupakan elemen penting dalam proses tata kelola keuangan yang baik, karena berfungsi untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Ketika penyimpangan teridentifikasi, tindakan korektif dapat segera diambil, sehingga informasi keuangan tetap relevan dan tepat waktu bagi penggunanya. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian, pengawasan juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini diperkuat dengan temuan Mau et al. (2022), yang mengemukakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Publik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan di SKPK Kabupaten Simeulue telah mengacu pada praktik pencatatan akuntansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Skor rata-rata responden yang tinggi pada indikator pengawasan memperkuat argumen bahwa sistem pengawasan yang diterapkan telah bekerja dengan baik.

Pengawasan keuangan lokal merupakan instrumen penting dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran secara efektif. Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah daerah

(pemda) sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Maria & Halim, 2021). Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta pengawasan eksternal melalui audit oleh BPK. Tak kalah penting, partisipasi masyarakat juga berkontribusi mendorong terwujudnya pengawasan yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi benturan kepentingan (Rahmayani & Nurhidayah, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Haza (2015), Ridwan et al. (2021), serta Mau et al. (2022), yang secara keseluruhan mengindikasikan bahwa pengawasan keuangan daerah berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue

Berdasarkan hasil analisis data dari kuesioner yang disebarakan kepada seluruh responden pada lingkungan SKPK Kabupaten Simeulue, diperoleh temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mempertegas bahwa aparatur dengan kompetensi yang memadai cenderung lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Kompetensi SDM merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini berkaitan langsung dengan kemampuan individu dalam memahami prinsip akuntansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan yang akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan data demografis responden, terlihat bahwa mayoritas memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yakni lulusan S1 sebanyak 60% dan S2 sebesar 15%. Meskipun terdapat 20% lulusan SMA dan 5% lulusan D3, komposisi ini

menunjukkan bahwa sebagian besar aparaturnya pemerintah daerah telah dibekali dengan pendidikan yang memadai di bidang pengelolaan keuangan publik.

Namun, kompetensi tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan formal. Pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pemahaman tentang sistem dan peraturan juga berkontribusi pada kompetensi yang lengkap. Responden dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah masih dapat menunjukkan kompetensi tinggi jika mereka memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang atau sering mengikuti pelatihan dan bimbingan keuangan daerah.

Menariknya, ada dua responden yang memberikan nilai terendah (skor 1) pada salah satu indikator kompetensi, berbeda dengan mayoritas responden lain yang memberikan nilai tinggi (4 atau 5). Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan persepsi, pengalaman pribadi, atau mungkin pemahaman yang terbatas tentang pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Namun, jawaban minoritas ini tidak secara signifikan mempengaruhi kesimpulan keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif teori keagenan, yang memandang pemerintah daerah sebagai agen yang berkewajiban secara etis dan profesional untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik selaku prinsipal (Maria & Halim, 2021). Dalam hal ini, kompetensi aparaturnya menjadi faktor kunci untuk menjamin proses pelaporan berjalan dengan akurat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Santika et al., 2022). Apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan, pengetahuan yang relevan, serta etos kerja profesional, maka penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana secara efektif dan optimal (Rahmayani & Nurhidayah, 2021).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Ihsanti (2014), Adhitama (2017), Hamruna et al. (2022), dan Mau et al. (2022), yang secara konsisten menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Animah et al. (2020), yang menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam karakteristik wilayah, tipe organisasi, serta pendekatan atau instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian masing-masing.

Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bersama-sama Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue

Hasil analisis data kuesioner yang diperoleh dari responden Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Simeulue mengindikasikan bahwa pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini diperkuat dengan hasil uji F yang menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara kolektif berkontribusi dalam memengaruhi variabel dependen secara statistik.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran serta peningkatan kompetensi aparatur dalam penyusunan laporan berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara mekanisme pengawasan dan kapabilitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Asiah, 2019). Pengawasan keuangan yang berjalan secara konsisten dapat membantu mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan anggaran sesuai rencana. Sementara itu, kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam memahami, mengimplementasikan, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat. Kombinasi keduanya menciptakan kondisi yang kondusif untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (Rahman & Permatasari, 2021).

Hasil temuan ini sejalan dengan kerangka teori keagenan, yang menyatakan bahwa hubungan antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dapat dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian seperti pengawasan dan peningkatan kompetensi. Ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak dapat diminimalisir melalui

pengawasan keuangan yang optimal dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Helmy & Silviana, 2024).

Temuan ini juga menegaskan hasil penelitian sebelumnya oleh Mau et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan kompetensi SDM secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, pemda perlu memperhatikan kedua aspek tersebut secara seimbang untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang lebih optimal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengawasan yang diterapkan, maka semakin baik pula mutu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Aparatur yang memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan teknis, serta pemahaman yang kuat terhadap prosedur akuntansi dan regulasi keuangan akan lebih mampu menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Secara simultan, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sinergi antara efektivitas pengawasan dan kapabilitas aparatur menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal teknik pengumpulan data. Penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya instrumen tanpa disertai wawancara langsung dapat mempengaruhi kedalaman informasi yang diperoleh. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan jadwal kerja karyawan yang padat di SKPK, sehingga tidak mungkin untuk melakukan wawancara. Akibatnya, ada kemungkinan jawaban responden tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual.

Saran

1. Mengingat adanya variasi kompetensi yang signifikan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara merata dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memperkuat kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang baik, terutama bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan non-akuntansi.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selain itu, disarankan untuk menggunakan metode campuran untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Animah, A., Suryantara, A. B., & Widia, A. (2020). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99-109.
- Anwar, M. S. (2019). *Good Governance: Konsep, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan daerah (studi empiris pada dinas perhubungan kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 1855-1869.
- Asiah, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). *Jurnal Akutansi*, 6(1), 1-14.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- BPK Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (2024). LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022. <https://e-ppid.bpk.go.id>
- Defitri, S. Y. (2016). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. 309-314
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181-197.
- Hamruna, I., Muhammad, Z., & Thaher, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal kolaboratif sains*, 5(10), 739-745.
- Hans, K. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 1(2), 60-72.
- Helmy, A., & Silviana, S. (2024). Human Resource Competence Effect on the Quality of Regional Work Unit of Financial Reports with the Government's Internal Control System. *Journal La Bisecoman*, 5(5), 706–721.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Koto, A. N. S. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta*.
- Mahardini, N. Y. & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi sumber daya manusia Padakualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bantentahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:STIE
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta
- Maria, E., & Halim, A. (2021). *E-government* dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Mau, C. L., Sonbay, Y. Y., Bibiana, R. P., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Man, S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 289-299.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 7(2), 14-30
- Nurlaila, E., Hendri, & Lestari, M. (2023). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 1-16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Rahmawati, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis, Universitas Negeri Jakarta.
- Rahmayani, E., & Nurhidayah, N. (2021). *Pengaruh Pengawasan Internal dan Transparansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 145–158.

- Ridwan, O. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci): *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(4), 93-110.
- Santika, I. P., Mustika, I. K., & Hari, N. L. K. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Applied Management Studies*, 4(1), 24-36.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kombinasi mix method*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1429-1443.